

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan merupakan suatu isu yang sering dibicarakan karena pelaksanaan implementasi merupakan tolak ukur dari keberhasilan program-program Pemerintah yang dicanangkan, salah satunya yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kab.Kudus nomor 12 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan toko modern yang mewajibkan toko Modern menjalin kemitraan dengan (UMKM) usaha mikro kecil dan menengah sehingga dalam tesis ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan Bagaimana upaya Strategi Pemerintah Kab.Kudus dalam mengembangkan UMKM.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan perekonomian rakyat di Kab.Kudus khususnya dalam bidang kemitraan dengan UMKM, serta menganalisis pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah di Kab.Kudus nomor 12 Tahun 2017.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis deskriptif kualitatif yakni dengan pusat perhatian pada masalah-masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional. subyek penelitian adalah Dinas tenaga kerja, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah Kab.Kudus ,dan beberapa pengelola usaha mikro kecil dan menengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi Peraturan daerah Kab.Kudus nomor 12 tahun 2017 pada penataan dan pembinaan toko modern belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan (2) Hambatan dalam menerapkan Perda tersebut antara pihak UMKM dengan Toko modern (3) Upaya Pemerintah Kab.Kudus dalam mengembangkan UMKM di Kab.Kudus.dan Hasil penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 di Kab.Kudus.

Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan UMKM , Kebijakan Publik, Toko Modern .

ABSTRACT

Policy Implementation is an issue related to the implementation of implementation is a benchmark of the success of the Government programs that were launched, one of which is the Implementation of the Regional Regulation of the Kudus regency number 12 of 2017 concerning the Arrangement and Development of modern stores that require Modern stores to establish partnerships with (UMKM) small and medium micro efforts in this thesis to understand the factors that become obstacles and How the Government of the Kudus Government Strategies in developing UMKM.

The purpose of this study was to determine the development of the people's economy in Kudus Regency, especially in the field of partnership with UMKM, and analyze the implementation of Regional Regulations in Kudus Regency number 12 of 2017.

The research method used in this research is descriptive qualitative sociological juridical with the focus on actual problems and describes the facts about the problem that need to be discussed accompanied by rational interpretation. The subjects of the study were the Department of Manpower, Industry, Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Kudus Regency, and several managers of Micro and Small and Medium Enterprises.

The results of this study indicate that (1) Implementation of Regulations from the Kudus Regency Number 12 of 2017 concerning the arrangement and construction of modern shops has not run as expected (2) Obstacles in this Regional regulation are expected between UMKM and modern stores (3) Efforts of the Regency Government Kudus in developing UMKM in Kudus Regency. dan The results of this study can help and become material for consideration to improve the implementation of regional regulation number 12 of 2017 in Kudus Regency

Keywords: Implementation, UMKM Empowerment, Public Policy, Modern Stores.